

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melaksanakan standar pelayanan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan;
  - menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang;
  - melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan; dan
  - melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Agustus 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN  
PUBLIK LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH.

NOMOR : 89 TAHUN 2018  
TANGGAL : 6 Agustus 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN  
PUBLIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan	Nama Jabatan
1.	Pengarah	Sekretaris Utama
2.	Koordinator	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
3.	Penanggung Jawab Layanan	
	3.1 Penanggung Jawab Layanan	Direktur Sertifikasi Profesi
	3.1.1 Pengelola Pengaduan	Siti Ulyanah Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
	3.2 Penanggung Jawab Layanan	Direktur Pengembangan Sistem Katalog
	3.2.1 Pengelola Pengaduan	M. Qadr Siddiq Zam Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
	3.3 Penanggung Jawab Layanan	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	3.3.1 Pengelola Pengadaan	Mahsa Elvina Rahmawyanet Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
	3.4 Penanggung Jawab Layanan	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
	3.4.1 Pengelola Pengadaan	Tri Susanto Kepala Seksi Pelaksana Konstruksi
	3.5 Penanggung Jawab Layanan	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
	3.5.1 Pengelola Pengaduan	Mira Erviana Kepala Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi

3.6	Penanggung Jawab Layanan	Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan
3.6.1	Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biantri Raynasari Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>2. Eva Ayuga Ningrum Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa</li> </ol>
3.7	Penanggung Jawab Layanan	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
3.7.1	Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verawaty Simorangkir Analisis Kebijakan Pertama</li> <li>2. Galuh Arini Sasi Kirono Analisis Sistem Informasi</li> </ol>
3.8	Penanggung Jawab Layanan	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
3.8.1	Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anas Bayu Kusuma Analisis Sistem Informasi Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I</li> <li>2. Arif Budiman Kepala Seksi Wilayah Maluku dan Papua</li> </ol>
3.9	Penanggung Jawab Layanan	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
3.9.1	Pengelola Pengaduan	Juniarty Erika Magdalena Saragi Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
4.	Pengawas	Inspektur Jhon Piter Halomoan Situmorang

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO